

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KAWASAN TIMUR TENGAH

Sistim internasional dengan beberapa negara yang berpengaruh sebagai sebagai partisipan global, sebagaimana hal itu menjadi keutamaan dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 hingga dimulainya Perang Dingin, yang umumnya disebut sebagai sistim multipolar (Meiertöns, 2010). Terhitung sejak kemerdekaannya, AS dengan cepat memperluas kekuasaan dari Samudera Atlantik hingga Samudera Pasifik (LaFeber: 2012: 43).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat tak lepas dari kepentingan nasionalnya yaitu untuk melindungi warga negara, teritorial, mata pencaharian, dan melindungi negara sekutu. Politik luar negeri Amerika Serikat selalu sejalan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Politik luar negeri Amerika mengalami dinamika perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi domestik maupun internasional. Politik luar negeri AS dinamis menyesuaikan kepentingan nasional dan konteks internasional yang sedang dihadapi. Setiap periode kepemimpinan menetapkan prioritas tertentu terkait politik luar negeri AS yang menunjukkan adanya perubahan yang menarik. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang beberapa hal diantaranya Membahas politik global Amerika Serikat dan Politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran.

A. Politik Global Amerika Serikat

Di awal kemerdekaan AS, politik luar negerinya bersifat ekspansionis dan belum mengemuka dengan jelas. Hal ini disebabkan begitu banyaknya persoalan domestik yang harus diselesaikan. Selama masa tersebut, fondasi penting dari diplomasi AS, yaitu tidak terikat dengan negara lain dalam suatu aliansi—khususnya negara Eropa yang berkekuatan lebih—karena dapat mendikte untuk patuh, dan menekankan pada kebebasan demi memanfaatkan kesempatan untuk

memperluas wilayah dan menyediakan keamanan. (LaFeber, 2012: 43). Misalnya, banyak negara bagian yang masih memerlukan keamanan dari ancaman Inggris Raya dan revitalisasi pasca merdeka (Hendrajit *et al*, 2010: 99).

Bentuk negara yang disepakati adalah negara federal berdasarkan konstitusi bahwa pemerintah federal mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menciptakan keamanan di seluruh negara bagian dari ancaman luar—khususnya militer Inggris setelah pelepasan wilayah—dan konflik di dalam negeri karena belum memiliki infrastruktur dan lembaga negara yang mapan (Alamudi, 1989: 33-34). George Washington sebagai Presiden pertama, memiliki kebijakan politik luar negeri yang cenderung netral dan bersifat kooperatif dengan negara-negara di Eropa (Hendrajit *et al*, 2010: 100). Kebijakan luar negeri pertama yang dicetuskan oleh Washington lebih mengarah pada hubungan perdagangan sebagai yang utama dan lebih sedikit hubungan politis (LaFeber, 2012: 44). Kerjasama ini dijalin atas dasar mutualisme yakni kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak AS dengan Negara Eropa (Alamudi, 1989: 33-34).

Kebijakan Washington kemudian dilanjutkan oleh Thomas Jefferson ketika ia menjabat pada 1801. Kendala yang harus dihadapi olehnya adalah ledakan populasi yang tentu membutuhkan wilayah lebih luas untuk bermukim. Pada masa ini, AS harus berhadapan dengan Napoleon Bonaparte yang hendak mendirikan *New World Empire* untuk Prancis. Jefferson menggunakan tekanan diplomatis yang intens terhadap Prancis (LaFeber, 2012: 45) dengan mempersiapkan sejumlah pasukan militer dan bersiap untuk perang. Namun, Prancis memilih menjual wilayah yang diperebutkan, yakni New Orleans dan wilayah bekas jajahan Spanyol dari Mississippi hingga Rocky Mountains.

Madison, yang menggantikan Jefferson, menghadapi Inggris yang mengacaukan kapal laut dan perdagangan AS. Konsentrasi ekspansi Madison adalah Kanada, namun tak disambut baik oleh wilayah itu karena mereka lebih menyukai

kehidupan di bawah kekuasaan Inggris. Tahun 1815 menyediakan kesempatan bagi AS untuk mengembangkan perdagangan ketika saat itu tiba masa damai di Eropa dan muncul banyak negara-negara merdeka di Amerika Latin dari kolonialisme Eropa (LaFeber, 2010: 45-46).

Doktrin penting awal kebijakan politik luar negeri AS dimulai pada masa Presiden James Monroe, yang kemudian disebut *Monroe Doctrine*. Prinsip dari doktrin dibedakan menjadi dua, yaitu pembatasan kebebasan bertindak negara yang bukan bagian benua Amerika di Amerika secara politis, dan pembatasan kebebasan bertindak AS secara politis terhadap negara-negara Eropa. Meiertöns (2010) mencatat tiga fase doktrin ini: (1) fase defensif-isolasionis yang mulanya, doktrin ini tidak bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan manifestasi hegemoni AS di Amerika Latin. Dengan kata lain, AS tidak melampaui batas dari penegasan tanggungjawabnya terhadap prinsip pan-Amerika untuk menjaga integritas wilayah (Meiertöns, 2010: 30-31); (2) Doktrin Monroe menjadi ‘instrumen imperialism Amerika’ dan ‘simbol klaim hegemonik AS atas area Amerika Tengah’ pada rentang 1890an hingga 1920an. Presiden Theodore Roosevelt mengekspresikannya dengan menjadikannya kekuatan Amerika atau ‘peran sebagai polisi internasional’ (Meiertöns, 2010: 32-33); dan, (3) fase multilateralisasi yang dimulai di awal 1930an terkait gerakan Pan-Amerika yang dilematis bagi AS karena pakta-pakta anti-intervensi antar negara di benua yang diadopsi dipandang membatasi gerak politik AS di Amerika Latin. Pada akhirnya, AS menyepakati tanpa keberatan (Meiertöns, 2010: 34-37).

Pada 1917, Presiden Woodrow Wilson menetapkan bahwa AS mengakhiri penolakannya terhadap Eropa dan mulai terlibat dengan mereka. Keterlibatan ini terlihat ketika Perang Dunia I, AS bergabung dengan Inggris dan Prancis melawan Jerman dan Austro-Hungaria, meskipun awalnya AS menolak untuk ikut serta. Politik luar negeri AS berlanjut pada pembentukan perdamaian dunia dengan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa. Pada masa ini, AS harus berhadapan dengan

revolusi berbasis kelas atau Sosialisme-Komunisme yang terjadi di Rusia dan China. Ketakutan AS dan Sekutu adalah banyaknya wilayah-wilayah jajahan yang menuntut kemerdekaan. Wilson kemudian mengubah arah kebijakan politik kearah perlawanan terhadap Komunisme dengan mengendalikan revolusi agar menganut gaya demokrasi Amerika (LaFeber 2012: 49-50).

Pecahnya Perang Dunia II memperlihatkan politik luar negeri AS yang lebih intens. Ketika Perang Dunia I AS cenderung ingin bersifat netral dan mengambil keuntungan di ekonomis darinya, namun Perang Dunia II AS menyatakan secara terang-terangan berpihak pada Sekutu. Ketika Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, meminta bantuan, Presiden Roosevelt merespon dengan bantuan ekonomi dan secara rahasia memerintahkan kapal perang AS untuk melacak dan—bila perlu—menenggelamkan kapal Jerman yang mengganggu perdagangan. Selain itu, Roosevelt juga membantu Stalin dan Uni Soviet untuk menggempur Nazi Jerman. Deklarasi perang Roosevelt dengan tegas dinyatakan terhadap Jepang setelah peristiwa *Pearl Harbor*. AS tampil sebagai negara adidaya yang produktivitas bidang industrinya justru meningkat hingga 90 persen. Perang Dunia II telah menguras kekayaan negara Sekutu dan Fasis serta merta memberi keuntungan bagi AS (LaFeber, 2012: 54).

Momentum Depresi Besar (*Great Depression*) dan Perang Dunia II membuka peluang bagi AS untuk menegakkan tatanan liberal internasional. Hal ini terbukti dengan berdirinya UN, institusi *Bretton Woods* (IMF dan *World Bank*), perdagangan bebas multilateral di bawah GATT (*General Agreements on Tariff and Trade*), sejumlah pengajuan bagi pengendalian senjata nuklir bilateral dan multilateral (*Bauch Plan, Atoms for Peace, Nuclear Non-Proliferation Treaty*, dan *Strategic Arms Limitation Treaties* di era Presiden Nixon), dan kemunculan kumpulan rezim internasional baru (Deudney and Meiser, 2012: 34). Berikut penjelasan kronologi kebijakan AS sebelum hingga dimulainya Perang Dingin.

Presiden Franklin Delano Roosevelt dan kemudian, penggantinya, Presiden Harry Truman menemui kesulitan yang menghapus harapan AS pasca perang dan menempatkannya dalam Perang Dingin. Roosevelt mengarah pada Inggris, yang sebelumnya mengatur hambatan perdagangan bebas, agar mereka membuka pasar bagi AS sebagai balasan atas bantuan militer ketika perang. Kebijakan ini berlanjut dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) dan lembaga ekonominya (*Bretton Woods*): Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF). Pendirian UN adalah suatu sarana bagi AS demi mencapai tatanan dunia yang penuh perdamaian dan kesejahteraan. Begitu pula dengan institusi ekonomi dan keuangan internasional sebagai sisi ekonomi dari UN bertujuan untuk menciptakan kerjasama finansial sementara AS-lah yang menguasai separuh kekayaan dunia saat itu sehingga memiliki kemampuan untuk mengendalikan dua institusi tersebut (LaFeber, 2012: 55). Meski terlihat mudah, namun Uni Soviet menolak untuk bergabung dengan lembaga-lembaga yang didirikan AS karena perbedaan pandangan ideologis yang kontradiktif. Pertentangan ideologis tersebut kemudian dua blok besar dunia: Blok Barat dengan ideologi Liberalisme-Kapitalisme dan Blok Timur dengan Sosialisme-Komunisme.

Perang Dingin (*Cold War*) bermula saat berakhirnya Perang Dunia II. Pertarungan hegemonik antara Blok Barat dan Timur yang masing-masing dipimpin oleh negara-negara pemenang Perang, AS dan Sekutu melawan Uni Soviet, bukan merupakan suatu konfrontasi senjata secara langsung. Ini mengakibatkan sistim internasional yang bersifat bipolar dan terjadi perimbangan kekuatan (*balance of power*) antar kedua belah pihak (Anwar, 2003: 10) Dua blok tersebut terlibat dalam berbagai konflik yang terjadi di negara-negara lain yang kebanyakan merupakan negara berkembang. Diawali oleh perang sipil Yunani, dimana Inggris mengirimkan pasukan mendukung pemerintah untuk menahan kelompok sayap kiri yang kemudian berujung pada kegagalan. Dari sinilah muncul doktrin pertama dari dua pilar utama kebijakan politik luar

negeri AS pada masa Perang Dingin. Pertama, *Truman Doctrine*, yakni doktrin geopolitik-militer yang dicetuskan oleh Presiden Harry Truman, yang memanggil seluruh penduduk AS untuk ikut menanggung beban untuk mendukung orang-orang yang merdeka dalam melawan percobaan penaklukan atau *coup d'état* yang dilakukan oleh kaum minoritas yang dipersenjatai atau tekanan dari luar (Saul, 2012: 66).

Pasca Perang Dunia II, AS memberikan bantuan ekonomi di wilayah Eropa Barat yang menderita kerugian akibat perang, yang disebut *Marshall Plan* (Anwar, 2003: 9) yang dicetuskan oleh Sekretaris Negara AS, George Marshall, sebagai doktrin kedua khusus dalam bidang ekonomi dari dua pilar.. Program ini bertujuan mempererat jaringan Eropa dengan AS dan mengimplementasikan kebijakan dari *Bretton Woods*. Kebijakan luar negeri AS ini dipandang penting karena berkaitan dengan bagaimana AS fokus pada pengembangan dalam politik domestik dari negara kapitalis lain, khususnya di Eropa Barat.

Perimbangan kekuasaan pada masa Perang Dingin memacu negara-negara besar dalam perlombaan senjata (*arms race*) dimana senjata nuklir menjadi andalan untuk memaksimalkan *deterrence power* (Karyono, 2005: 30). AS kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai proliferasi senjata nuklir atau *nuclear non-proliferation treaty* (NPT) pada tahun 1968 (Jamaan, 2007: 38). Kebijakan ini ditopang dengan dibentuknya *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang berada di bawah *UN Security Council* (AS, Uni Soviet/Rusia, Inggris, China, dan Prancis). AS melihat menjamurnya pengembangan senjata nuklir di beberapa negara berkembang yang berpotensi menjadi saingan dan menggoyahkan statusnya sebagai kekuatan besar, contohnya India dan Pakistan yang berada dalam atmosfer ketegangan akan perang yang mungkin terjadi antara keduanya.

Berakhirnya Perang Dingin menampilkan kebijakan politik luar negeri AS yang dapat dikatakan kontras karena dua presiden yang berasal dari dua partai berbeda (Dumbrell,

2012, 90): George H. W. Bush (Bush Senior) dari Partai Republik yang konservatif serta bertumpu pada kekuatan militer yang berfokus di isu keamanan (*hard power*), dan Bill Clinton dari Partai Demokrat yang lebih mengutamakan perdamaian dan diplomasi (Nye, 2002: 38). Bush Senior berfokus pada bagaimana mengatur transformasi luar biasa dan yang tak disangka yang terjadi di Rusia dan Eropa Timur. Perlu dicatat mengenai kebijakan Bush Senior adalah ketidakhati-hatiannya, semisal ketika AS menginvasi Panama atas dasar keamanan warga Amerika, mempertahankan demokrasi di Panama. Kebijakan ini menjadi pembuka penggunaan militer secara langsung pasca Perang Dingin. Kasus lain ketika AS mendukung invasi ilegal Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein ke Kuwait yang justru di-*backup* oleh UN, namun di akhir perang justru AS mempertahankan Arab Saudi dan menyerang Irak yang ketika itu memutuskan menarik mundur militernya.

Berbeda dengan Bush Senior, Clinton lebih memilih pendekatan yang kooperatif dan diplomatis—atau lebih dikenal dengan sebutan *soft power*—untuk menyelesaikan konflik internasional (Jafar, 1996: 113). Kebijakan Clinton sangat berpengaruh di bidang ekonommi, yakni penandatanganan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) bersama Kanada dan Mexico. Dalam kebijakan militer dan keamanan, Clinton mendorong komitmen dalam proses demokratisasi di negara bekas Uni Soviet, yakni Rusia dan negara Eropa Timur lainnya. Kebijakan ini meraih pencapaian besar, yaitu ekspansi NATO ke Eropa Timur (Dumbrell, 2012: 92). Clinton mengubah warisan Bush Senior dari unilateralis menjadi multilateralis.

AS di bawah kepemimpinan George W. Bush (Bush Junior) kembali mengarahkan politik luar negeri kembali menjadi unilateralis yang agresif. Peristiwa 11 September 2001 yang membuat pihak Gedung Putih merilis *National Security Strategy* (NSS). Prinsip penggunaan kekuatan militer ini dicantumkan pada NSS, yang kemudian dikenal dengan *Bush Doctrine* (Meiertöns, 2010: 179-180). Kebijakan Bush

ini tentu sejalan dengan nilai-nilai konservatisme Partai Republik yang mendorong penggunaan *hard power*. Terlepas dari jenis pendekatan apa yang digunakan dalam menyelesaikan konflik internasional, *hard power* dan *soft power* sama-sama memiliki peranan penting dalam politik luar negeri (Nye, 2002: 141).

Pernyataan NSS tentang penggunaan kekuasaan yang dicatat dalam Meiertöns (2010: 180):

“We will disrupt and destroy terrorist organizations by: ...defending the United States, the American people and our interests at home and abroad by identifying and destroying the threat before it reaches our borders...we will not hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of selfdefense by acting pre-emptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country.”

Dengan beberapa interpretasi terhadap peristiwa 11 September, kebutuhan untuk melakukan tindakan preventif dalam mencegah, yang dianggap sebagai, ‘teroris’ ditekankan sebagai berikut:

“As was demonstrated by the losses on September 11, 2001, mass civilian casualties is the specific objective of terrorists and these losses would be exponentially more severe if terrorists acquired and used weapons of mass destruction.

The United States has long maintained the option of pre-emptive actions to counter a sufficient threat to our national security. The greater the threat, the greater is the risk of inaction – and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s attack. To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the United States will, if necessary, act pre-emptively . . .”

Kenneth Waltz, salah satu tokoh Neo-Realisme, menyebutkan tiga faktor pemicu kemunculan sikap arogan dan unilateralis AS (Anwar, 2003: 14). Pertama yaitu berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya

tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Persitiwa-peristiwa tersebut membuka peluang dan menjadikan AS sebagai satu-satunya negara *superpower* yang masih tegak. Negara-negara lain tentu akan memperhitungkan untuk melakukan konfrontasi dengan, atau setidaknya mengusik, kepentingan nasional AS. Kedua, dominasi kekuatan ekonomi mengingat AS yang telah melampaui Eropa serta Asia Timur dengan *Marshall Plan* dan ketergantungannya yang rendah terhadap perdagangan bebas internasional hingga mampu mengontrol institusi ekonomi internasional, IMF dan *World Bank*. Ketiga, kapabilitas militer AS yang merupakan terbesar, terlebih jika ketika dipimpin oleh Presiden dari Partai Republik. Peningkatan anggaran belanja menjadi keharusan bagi AS dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan menaikkan *political bargaining*-nya.

Presiden Bush juga telah memformulasikan prinsip tindakan pencegahan demi perlindungan diri sebagai dasar bagi kebijakan keamanan AS dalam sebuah pidato di Akademi Militer AS di Westpoint pada tanggal 1 Juni 2002 sebagai berikut:

“For much of the last century America’s defense relied on the cold war doctrines of deterrence and containment. In some cases, those strategies still apply, but new threats also require new thinking. Deterrence – the promise of massive retaliation against nations – means nothing against shadowy terrorist networks with no nation or citizen to defend. Containment is not possible when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies...If we wait for threats to fully materialize, we will have waited too long...We must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and confront the worst threats before they emerge...”

Untuk menunjang kebijakan ini, Bush diiringi oleh orang-orang berhaluan Neo-Konservatif yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: Wakil Presiden Dick Cheney, Kepala Dewan Kebijakan

Pertahanan Richard Perle, Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz, dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 126).

Pasca Perang Dingin hingga awal 2000an, kebijakan politik luar negeri yang diformulasikan oleh AS sangat dipengaruhi oleh tokoh Neo-Konservatif, yaitu Bush Senior dan Junior, atau dikenal dengan *invisible government* (Hendrajit 2010, h. 83). Meski Bill Clinton sebagai penganut multilateralisme, keberadaan dan pengaruh kelompok Neo-konservatif sebagai peletak dasar utama dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri demi keamanan dan kepentingan nasional AS (Hendrajit 2010, h. 83).

B. Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Timur Tengah

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya setelah Perang Dunia II, merupakan sebuah fenomena politik baru dalam politik global yakni kerjasama dan integrasi negara dalam suatu kawasan dalam skala kontinental. Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (David Held. 2000, Regulation Globalization, international sociology, 394).

Setelah Perang Dunia II berakhir banyak perubahan yang terjadi dari setiap bangsa/negara, terutama dalam hal kekuasaan politik serta penyebaran pengaruh terhadap suatu kawasan. Timur Tengah merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak, kawasan ini juga dikenal dengan kawasan yang paling bermasalah di dunia. Konflik sektetarian, upaya perdamaian, serta keinginan Amerika Serikat untuk mendominasi dunia mulai terlihat. Tidak selalu

mulus pastinya, dan kita akan melihat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya terhadap Iran. Sebuah laporan di Times pada 1961 melemparkan penilaian berikut mengenai bantuan AS kepada Iran selama dasawarsa sebelumnya:

“Angka-angka statistik layak dipertimbangkan. Sejak 1952, atau sesaat sebelumnya, bantuan dan pinjaman Amerika dalam beberapa bentuk kepada Iran telah mencapai sekitar \$1.135 juta. Dari jumlah itu, sekitar \$631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan \$504 juta untuk bantuan militer. Semua bantuan militer dan lebih dari setengah bantuan ekonomi berupa hibah, sehingga yang berbentuk pinjaman itu belum dimulai sama sekali.” (FO 317 157604 EP 1015/102 *Internal Political Situation*, 18 Mei 1961).

Bantuan seperti ini mudah diterima Reza Syah Fahlevi, dengan memainkan ketakutan Amerika Serikat terhadap komunisme dan terutama mengenai peran strategis Iran di kawasan dalam menghadapi ancaman Soviet. Sehingga AS memenuhi keinginan Syah untuk memperbarui angkatan bersenjata demi keamanan. Tetapi, semua peralatan serta teknologi yang diberikan jatuh pada kelompok revolusioner di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Revolusi Islam dan krisis penyanderaan yang mengikutinya menjadi peristiwa yang mencapai masyarakat umum. Ini akan menjadi isu dengan makna penting langsung secara domestik dan semakin penting lagi karena kehadiran rakyat biasa Iran dan Amerika Serikat di masing-masing negara.

Dalam Konflik Irak-Iran pada September 1980 dimana Amerika Serikat menyatakan sikap netral dalam konflik tersebut, walaupun lebih condong dalam membantu Irak. Bertambahnya dukungan Amerika Serikat terhadap Saddam Husein sepanjang perang, yang dipertegas dengan kedatangan Donald Rumsfeld ke Irak dan pemulihan hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1984.

Amerika Serikat bersedia membantu Irak dalam sejumlah cara, melalui sumber daya ekonomi, dukungan dalam

forum internasional dan yang paling istimewa adalah pencitraan satelit seketika yang dapat secara langsung melihat pergerakan pasukan Iran, sebuah hak istimewa yang hingga sekarang hanya diberikan kepada Israel. Dan yang paling signifikan yakni, kebijakan pembiaran atas pengembangan senjata kimia yang dilakukan Irak, yang akan diuji cobakan untuk tentara Iran (James A. Bill, 1988 : 306).

Iran marah terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam penggunaan peralatan yang kini digambarkan sebagai senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein. Ketidakpercayaan Iran terhadap Barat khususnya AS yang ditimbulkan kejadian ini luar biasa besar.

Amerika Serikat dengan tegas mengutuk rezim baru, yang tidak mempunyai hubungan resmi dengan AS, dan akan menerapkan sanksi. Sebagian sanksi, seperti sanksi yang diterapkan Eropa, mengurangi peredaran senjata ke Iran dan Irak., AS secara aktif berhubungan dengan oposisi Iran, terutama kaum monarki dan putra mendiang Syah yang pada waktu itu menjadi penduduk AS. Amerika Serikat juga menyerang pertumbuhan fundamentalis Islam di Iran, namun terus mendukung kaum fundamentalis Islam di Afghanistan yang menentang Soviet, dan mengumumkan perang melawan terorisme (Ali M. Ansari, 2006 : 121-122).

Sikap seperti ini membuat mereka semakin dekat dengan Israel, yang seperti Amerika Serikat telah kehilangan sekutu regional berharga akibat Revolusi Islam 1979. Pada 1983 terjadi serangan bom bunuh diri di kedubes dan barak militer Amerika Serikat di Beirut. Serangan ini meruntuhkan kepercayaan diri AS di kawasan itu dan menghasilkan penarikan mundur pasukan penjaga keamanan AS dari Libanon. Peristiwa ini menandai krisis kebijakan luar negeri pertama pemerintahan Reagan. Sebagaimana halnya dengan krisis semacam ini, menyalahkan pihak lain merupakan pilihan politik yang lebih mudah. Ini juga menandai munculnya tren dalam penilaian kebijakan luar negeri AS, di mana ada ambiguitas, perimbangan konsesus menyimpulkan bahwa Iran pasti bertanggung jawab.

Serangan terhadap Kedubes AS dan barak militer di Libanon dianggap serangan nonsipil yang sah sebagai akibat dari apa yang kemudian digambarkan pemerintah AS sebagai misi rahasia, yang membuat pasukan AS ikut campur atas nama Angkatan Darat Libanon, yang secara umum pada waktu itu dianggap sebagai salah satu dari banyak faksi yang berebut kendali atas Libanon (The Times, 1980 : Defence and Foreign Affairs).

Amerika Serikat bersikeras untuk terus menyalahkan Iran, tapi kenyataannya Iran terlibat dalam pertempuran dengan Irak, yang pada waktu itu menikmati hubungan lebih produktif dengan AS. Konsekuensi serius dari dukungan internasional dan AS kepada Irak ini datang seiring dengan Perang Tanker. Saat semua serangan ini memuncak, Kuwait meminta perlindungan asing, hasilnya Amerika Serikat menempatkan kapal-kapal Kuwait dalam perlindungan mereka dan memasuki Teluk Persia Iran dan terlibat dalam konfrontasi langsung.

Salah satu kapal yang di kirim untuk berpatroli ke Teluk bagian utara, USS Stark, menjadi sasaran misil udara-ke-darat Irak yang mengakibatkan kematian 37 tentara Angkatan Laut AS. Atas tragedi ini, Presiden Reagan menyalahkan Iran yang digambarkannya sebagai barbar dan musuh yang sesungguhnya (James A. Bill, 1988 : 307). Kapal yang bertempur selanjutnya adalah USS Vincennes, dengan panik menambakkan rudal dan meledakkan sebuah pesawat terbang sipil Iran Air yang menewaskan 290 orang. Peristiwa ini bukan saja sebuah tragedi melainkan juga sebuah aib besar bagi pemerintah AS. Selanjutnya, yang mengejutkan dari insiden ini bukanlah kelalaian kriminal yang menyebabkan peristiwa ini melainkan aksi menutupi kesalahan yang mengikutinya, terutama keputusan Presiden Ronald Reagan untuk menghadiah sang kapten dengan medali atas keberhasilan menjalankan tugas. Bahkan rakyat Iran yang tidak setuju dengan Republik Islam Iran pun memandang ini sebagai sebuah sinyal aneh dan menyinggung. Peristiwa ini, serta peristiwa yang menyelimuti UUS Strak, meyakinkan

kaum skeptis di Iran bahwa AS adalah Setan Besar. Pemerintah AS kemudian menawarkan kompensasi yang setara dengan standar hidup, meski mereka menolak bertanggung jawab (BBC SWB ME/1968 MED/17, 11 Oktober 2000).

Salah satu dampak dari penembakan tragis terhadap pesawat Airbus Iran adalah bahwa Ayatullah Khomeini memutuskan untuk menerima resolusi gencatan senjata yang didesakkan kepadanya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama delapan tahun. Politik jaringan pipa yang dikembangkan sepanjang tahun 1990-an, dan sebuah studi kasus yang tepat mengenai bagaimana kepentingan nasional AS diciptakan dan dinyatakan dalam tampilan budaya serta pandangan historis.

Jika Anda ingin mendapat dukungan dan bantuan AS, menunjukkan kecenderungan budaya Persia merupakan sebuah tindakan yang salah secara politis. Konsekuensinya, negara-negara baru pecahan Uni Soviet yang ingin mendapat bantuan AS berbuat sebaik mungkin untuk menutupi hubungan budaya ini. Yang membuat mulut para pengamat Iran ternganga bukannya penyangkalan terhadap segala asosiasi budaya dengan Iran, melainkan penyalahgunaan budaya dan sejarah tersebut sedemikian rupa sampai-sampai Tamerlane menjadi Usbek, Partians menjadi Turkmen, dan festival Tahun Baru Persia yaitu Now Ruz menjadi sebuah kontribusi Turki (Ali M. Ansari, 2006 : 163).

Dalam hal religius, negara-negara baru tersebut mayoritas rakyatnya Sunni, yang merupakan sebuah pembeda penting dengan Iran yang Syiah, walaupun rakyat Iran dengan sangat cepat melepaskan apa yang tidak sesuai dengan ambisi imperial mereka, dan dalam ini sekulerisasi politik Iran belum sepenuhnya dihargai.

Presiden Bill Clinton yang memenangkan pemilu dengan mengusung kebijakan dalam negeri dengan tujuan memanfaatkan kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Politik dalam negeri akan menjadi prioritas AS. Bencana di Somalia, dimana mayat tentara AS diseret

melewati kota di Mogadishu mendorong perkembangan diri terhadap kebijakan politik luar negeri AS. Keputusan ini juga memperlihatkan kekurangan dan ketidak pengalaman pemerintahan Clinton dalam manajemen kebijakan politik luar negeri. Dari sudut pandang Timur Tengah, masa bakti pertama Clinton didominasi oleh prioritas Israel, dalam sebuah pergeseran kebijakan kualitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bush, dan terutama Menteri Luar Negeri James Baker, dikenal dengan pendekatan imarsial mereka terhadap konflik Arab-Israel, yang dilambangkan dengan kecaman verbal Baker terhadap pemerintah Israel dalam sebuah sesi dengan pendapat Kongres (Ali M. Ansari, 2006 : 159).

Proses perdamaian yang berkembang ini menghasilkan sebuah reorganisasi intelektual di mana lawan tradisonal Israel, yaitu negara- negara Arab di sekitarnya, kini harus diakomodasi dalam sebuah bingkai rasa hormat dan potensi kerja sama. Adalah penting untuk membingkai gambaran ini dalam suatu kemasan, sehingga tiba-tiba ditemukan bahwa Arab dan Yahudi sama-sama Semit. Dalam hal hubungan internasional hal ini ditentukan oleh hubungan inti-pinggir di mana Israel mentransfer permusuhannya dengan negara-negara tetangga dari inti ke pinggir, dengan kata lain, ke Iran (Ali M. Ansari, 2006 : 180). Ini merupakan sebuah upaya ceroboh untuk memberi legitimasi teoritis bagi keharusan politik ini tidak sepenuhnya akan berhasil. Persistiwa 11 September merupakan sesuatu yang membuat Amerika Serikat sangat terkejut, dan pelakunya adalah sekutu AS sendiri, yakni Mesir dan Arab Saudi.

Amerika Serikat didukung penuh oleh komunitas internasional dan PBB, berniat membalas Taliban di Afghanistan. AS membutuhkan Iran, dan Iran sebaiknya bersikap bermurah hati untuk membantu. Rangkaian peristiwa yang terjadi secara efektif berfungsi, setidaknya pada tataran regional dan partikultural, menyeimbangkan kondisi hubungan antara Iran dan AS (M. Hajizadeh, 2002 : 143-146).

Perang ini (Irak) adalah proyek liberal, revolusioner, dan pembentukan demokrasi yang peling penting bagi

Amerika Serikat sejak Marshall Plan. Ini adalah hal yang paling mulia yang pernah dilakukan negara ini di luar negeri (Thomas Friedman, peneliti hubungan internasional dari New York Times, November 2003).

Kebijakan Amerika Serikat soal Irak di akhir 2002, memutuskan untuk membalas serangan tersebut dengan menginvasi Afghanistan. Dan yang terjadi adalah Afghanistan dan kemudian Irak diduduki, masalahnya kini adalah penyelesaian ini lebih terfokus pada kekuatan fisik. Pada Februari 2008 sekitar 4000 tentara Amerika Serikat tewas akibat perang tersebut dan jutaan rakyat Irak, dimana George W. Bush mengatakan:

“Ketika kita mengangkat hati kepada Tuhan, kita setara di mata-Nya. Kita sama-sama berharga. Dalam doa, kita tumbuh dalam pengampunan dan kasih. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan untuk mencintai tetangga kita seperti kita mencintai diri kita, kita memasuki persahabatan yang lebih dalam dengan sesama manusia.” (*National Prayer Breakfast*, Washington, D.C, 7 Februari 2008)

C. Kepentingan Amerika Serikat Terhadap Iran

Kebijakan luar negeri terhadap Middle East selama Perang Dingin selalu diiringi logika realis, khususnya melalui upaya untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri dari negara-negara Timur Tengah. Kepentingan kunci US saat itu lebih tertuju pada sumber daya minyak dan melindungi Israel yang pada pertengahan abad 20 baru saja berdiri, terancam oleh prospek perang antar negara di wilayah tersebut (David, 2006: 616). AS juga harus berhadapan dengan rival terbesarnya, Uni Soviet, dalam perang hegemoni. Rivalitas ini memaksa AS untuk melakukan intervensi, baik langsung maupun tidak, untuk menanamkan pengaruhnya, salah satunya adalah hubungannya dengan Iran.

Hubungan AS-Iran mengalami pasang surut, dari bentuknya yang kooperatif hingga konfrontatif.

1. Pra Revolusi Islam Iran 1979

Iran memiliki sejarah dieksploitasi oleh kekuasaan-kekuasaan asing. Sebelum AS, Inggris lebih dulu memiliki afiliasi dengan Iran yang dimulai pada tahun 1941 (Puar, 1989: 22). Selama Perang Dunia II, dua blok besar resah dengan kedekatan Iran dan Jerman. Di bawah kepemimpinan Reza Khan Shah Pahlevi (1925-1941), Iran mendukung Jerman karena suplai minyak kepadanya lebih menguntungkan dan balasan dari Jerman berupa teknologi industri dan pelatihan militer (Puar, 1980: 22).

Melihat persaingan Inggris dan Rusia, AS tentu tidak tinggal diam melihat potensi sumber daya alam yang besar di Iran. Peran AS di Iran untuk pertama kalinya adalah Kudeta 1953 terhadap Presiden Mossadeq yang terpilih secara demokratis dan digantikan oleh Shah Reza Pahlevi. Kudeta ini dipandang oleh masyarakat Iran sebagai bukti nyata akan pengaruh imperialistik AS terhadap Timur Tengah umumnya dan khususnya Iran. Catatan mengenai peristiwa 1953 berada dalam sejarah resmi CIA dan bukan pada sumber dari masyarakat Iran sendiri (Cook and Roshandel, 2009:)

Karena hubungan yang begitu harmonis antara Iran-Jerman, maka Inggris-Uni Soviet (sekarang Rusia), dengan berbagai cara akan memaksa mundur Reza Khan dari tahta kepemimpinan parlemen di Iran. Reza Khan turun dari kepemimpinannya, digantikan oleh Muhammad Reza Shah Pahlevi yang merupakan anaknya. Semenjak Iran berada Rezim Reza Pahlevi, akses Inggris dan Uni Soviet semakin mudah untuk melakukan ekspansi ke Iran. Inggris-Uni Soviet dengan mudah mengirimkan angkatan-angkatan perangnya. Akan tetapi, angkatan perang tersebut tetap menjamin kemerdekaan bagi Iran yang tercantum dalam kesepakatan Perdamaian Tiga Serangkai Tripattie Treaty, Inggris, Uni Soviet dan Iran pada 1942 (Puar 1980, h. 22). Isi perjanjian yakni mencegah pengaruh Jerman di Iran, Inggris-unisoviet segera mendirikan benteng pertahanan di wilayah Jerman Barat untuk membendung kekuatan militer Jerman. Kemudian,

perjanjian tersebut dipertegas kembali dalam konferensi Yalta pada Februari 1945 antara ketiga negara tersebut.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Uni Soviet secara tegas menolak untuk menarik pasukan militernya dari Iran. Uni Soviet bahkan memperluas pengaruh komunisnya di Iran. Dibuktikan Uni Soviet dengan mudah membentuk pemerintahan komunis otonom di Azerbaijan, Provinsi otonom di Barat Laut Iran pada tahun 1945-1946 (Puar 1980, h. 23). Keputusan tersebut memicu terjadinya konflik internasional dan menjadi perhatian khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hasilnya Uni Soviet bersedia menarik kembali pasukan militernya setelah terbentuk kesepakatan bersama antara Uni Soviet dan Iran yang bernama soviet-iran, untuk melakukan penambangan minyak di provinsi sebelah Utara (Puar 1980, h. 23).

Ketika Uni Soviet mundur dari Iran pada tahun 1946, Inggris semakin menguatkan hegemoninya di Iran. Inggris demham mudahnya mengeksploitasi lading sumur minyak Kuzhistan sebelah Barat Daya Iran (Kazhim dan Hamzah 2007, h. 35). Mundurnya Uni Soviet dari Iran menjadikan Inggris satu-satunya negara asing yang memiliki pengaruh di Iran. Akan tetapi, pengaruh komunisme di Iran tidak begitu hilang. Buktinya Uni Soviet tetap melancarkan operasi klandestin terhadap Iran. Sehingga terjadi percobaan pembunuhan terhadap Reza Shah Pahlevi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berhaluan kiri (Puar 1980, h. 24). Inilah yang menjadi alasan AS untuk melakukan intervensi tindakan politik terhadap Iran.

Amerika Serikat melihat pengaruh Inggris yang begitu kuat di Iran dan berusaha untuk menggeser dominasi Inggris tersebut (Ansari 2008, h. 51). Kedatangan AS ke Iran merupakan bencana politik bagi Inggris yang merupakan kekuatan asing terbesar di Iran. Inggris memandang AS akan menjadi ancaman yang patut diwaspadai karena dapat mengakibatkan hilangnya pengaruh monopoli Inggris atas minyak Iran (Ansari 2008, h. 55). Kedatangan AS ke Iran untuk mengusung jalinan kerjasama dengan Iran, AS

menganggap Iran sebagai rekan kerjasama yang baik. Kerjasama yang diusung AS yakni, pelatihan angkatan militer bersenjata untuk tujuan mempertahankan dinasti kekuasaan Reza Shah Pahlevi, yang kemudian hari AS menjadikan Iran sebagai pintu masuk untuk menghilangkan pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah (Puar 1980, h. 25).

Perlahan hubungan diplomatik antara Iran-AS semakin menguat, terlebih lagi setelah AS membantu Iran dengan kucuran dana dan mengrimkan penasehat militer ke Iran. Prioritas dari AS adalah memajukan angkatan bersenjata Iran untuk menjadi pelindung terdepan dalam upaya menghilangkan pengaruh komunisme di Iran dan Timur Tengah (Puar 1980, h. 25). Reza Shah Pahlevi melihat keuntungan yang didapatkan dari hubungan diplomatik dengan AS. Iran meminta AS untuk terus memberikan bantuan aliran dana untuk berinvestasi di Iran. Tercatat dalam publikasi majalah times terkait bantuan yang diberikan AS kepada Iran sejak 1952, bantuan dana mencapai US\$ 1.135 juta (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h. 56). Dari jumlah sekitar US\$ 631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan US\$ 504 juta untuk bantuan militer (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h. 56). Semua bantuan aliran dana militer dan sebagian dari bantuan ekonomi merupakan sedekah untuk Iran, sehingga yang merupakan hutang Iran hanya sekitar US\$ 255 juta (Times 1961, dikutip dalam Ansari 2008, h.56).

Dilihat dari jumlah data tersebut, betapa tingginya bantuan dan investasi Amerika Serikat terhadap Iran, dalam rangka upaya mencegah pengaruh komunisme Uni Soviet di Iran dan di Kawasan Timur Tengah. Dengan adanya doktrin Eisenhower selaku Presiden AS pada tahun 1957, yang menyatakan bahwa, AS akan memberi bantuan terhadap negara-negara di setiap wilayah untuk mempertahankan hegemoni AS, integritas dan kemerdekaan negaranya dari ancaman komunisme dan subversi dalam negeri (Puar 1980, h. 25).

Menurut Mutual Security Act (program bantuan keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada

negara-negara yang sejalan dengan kepentingannya), pada 1951-1953 bantuan tersebut berupa bantuan militer, ekonomi, dan teknik yang dapat diberikan kepada negara-negara sahabat AS (Puar 1980, h. 26). Setelah memberikan bantuan dan investasi terhadap Iran, AS menjadikan Iran sebagai sekutu terdekat di Timur Tengah. AS juga melakukan intervensi internal pada pemerintahan Reza Shah Pahlevi. Misalnya, keterlibatan AS dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Iran, terutama dalam hal sistem agraria (Ansari 2008, h. 62). AS dalam melakukan intervensi mendesak Reza Shah Pahlevi segera melakukan perubahan di sektor agraria, dengan perubahan struktur feodal lama dengan sistem kepemilikan tanah yang bebas. Para petani yang mempunyai lahan tanah akan menggarap tanah mereka sendiri dan memetik manfaat dari hasil kerja keras mereka sendiri.

Kebijakan perubahan dalam sektor agraria tersebut menyebabkan struktur ekonomi yang ada di Iran, di antaranya menumbuhkan deregenerasi ekonomi dan semangat nasionalisme. Namun, tujuan tersebut merupakan cara AS untuk menjalankan politik *divide et impera* untuk memecah para tuan tanah di Iran yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Inggris dan Ulama-Ulama senior di Iran (Puar 1980, h. 38). Pada kenyataannya kebijakan tersebut berdampak buruk bagi rakyat yang secara langsung terkena dampaknya. AS memanfaatkan tenaga rakyat untuk menggarap tanah-tanahnya yang keuntungannya lebih banyak didapatkan AS (Ansari 2008, h. 63).

Perlakuan Amerika Serikat terhadap Iran semakin merugikan rakyat Iran dan Reza Shah Pahlevi, beberapa bukti tindakan AS yang merugikan Iran, antara lain, Pertama, memfasilitasi kudeta atas mantan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadeq yang sedang berjuang untuk menasionalisasikan berbagai perusahaan minyak yang ada di Iran dari eksploitasi asing. Kedua, reformasi agraria yang merugikan tanah rakyat dan tuan tanah yang banyak dimiliki oleh Ulama besar Iran. Ketiga, keputusan untuk meratifikasi UU (Undang-Undang) yang menjamin kekebalan hukum

terhadap seluruh personil AS di Iran. UU Kekebalan terhadap seluruh personil AS berlaku di Iran dan kedaulatan Iran semakin merosot. Status sebagai warga negara Iran semakin rendah di mata warga negara AS yang berada di Iran. Pasalnya, ketika terdapat warga AS yang membunuh seorang Marja (Ulama yang fatwanya sangat diikuti), polisi Iran tidak mempunyai hak menangkapnya dan pengadilan di Iran pun tidak mempunyai hak untuk mengadilinya, pelaku hanya mendapatkan hukuman harus dipulangkan ke AS untuk diputuskan hukuman apa yang patut didapat terhadap si pelaku (Ansari 2008, h. 69). Begitupun sebaliknya, jika terdapat warga Iran yang menabrak atau membunuh binatang peliharaan milik warga negara AS, dengan sangat tegas akan dibawa ke pengadilan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku (Ansari 2008, h. 69).

Hubungan bilateral antara Iran-Amerika sangat dimanfaatkan oleh kedua Negara tersebut. Bagi AS, ini merupakan suatu keuntungan yang besar karena AS dapat menikmati keuntungan hasil penjualan minyak Iran. Sebaliknya, kondisi ini dimanfaatkan Iran untuk mengembangkan teknologi program nuklir. AS mendukung pengembangan teknologi program nuklir Iran pada masa Reza Shah Pahlevi (Ansari 2008, h. 81). Pada tahun 1974, tercatat telah terjadi perjanjian antara Iran-Amerika bahwa untuk 10 tahun kedepan AS akan memberikan bantuan listrik beserta uranium yang telah diperkaya untuk membantu pengembangan teknologi program nuklir Iran (Ansari 2008, h. 81). Dibalik kesesoakatan perjanjian tersebut, AS me,inta supaya Iran dapat memasok lebih banyak minyak Iran ke AS dengan maksud untuk dijual ke luar negeri. Sebenarnya, Reza Shah menyadari bahwa menjadikan minyak sebagai senjata Iran, bukanlah hal yang tepat. Karena jika minyak Iran secara terus menerus di pompa Iran akan mengalami krisis energi. Namun apa daya, Reza Shah Pahlevi menjadikan minyak Iran untuk melanggengkan kekuasaannya di bawah kendali AS tanpa memikirkan nasib rakyat atas ketidakadilan yang diterapkan Shah dalam kepemimpinannya.

Tanpa disadari oleh Reza Shah Pahlevi, rakyat bersama Ulama telah melakukan konsolidasi kekuatan untuk memprotes kebijakan kepemimpinan Shah yang telah membuka ruang bagi Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Iran. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan Shah dengan AS hanya menguntungkan kelompok pemerintahan saja. Semenjak tahun 1978, pergolakan dalam negeri di Iran terus bergejolak. Rakyat dan Mahasiswa yang digerakkan Ulama-Ulama Iran turun ke jalan untuk memprotes segala ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Shah terhadap rakyat Iran (Puar 1980, h. 47). Terdapat tiga alasan perlawanan Rakyat Iran terhadap Shah. Pertama, pemerintahan Reza Shah Pahlevi secara sistematis melakukan penindasan terhadap rakyat Iran. Kedua, korupsi yang sistematis dilakukan oleh keluarga beserta orang-orang sekitar Reza Shah Pahlevi. Ini merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi rakyat Iran, Negara dengan penghasil minyak dan memiliki ekspor minyak yang besar tetapi rakyat tidak merasakan keuntungannya. Ketiga, pemerintahan yang berkiblat pada model Barat terutama pengaruh AS yang begitu besar. Dari penjelasan tersebut tentu menjadi alasan terjadinya perlawanan Rakyat Iran terhadap pemerintahan Reza Shah Pahlevi.

Pengaruh model kepemimpinan dan budaya Barat di Iran semakin mencemaskan masyarakat Iran. Pasalnya, Iran dan Amerika Serikat memiliki sejarah peradaban yang berbeda (Puar 1980, h. 27). Pada awal terbentuknya, Iran merupakan negara yang berbentuk monarki konstitusional yang sudah berusia ±25 abad hingga meletusnya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Pada tahun 1118, Iran memperoleh kemerdekaan dari raja-raja seljuk kesultanan Turki (Puar 1980, h. 32). Pada masa tersebut Iran dipimpin oleh raja-raja Islam yang sangat menunjukkan identitas keislaman selama kepemimpinannya (Puar 1980, h. 32). Identitas tersebut dapat dilihat dari Masjid, Mihrab, Madrasah, menara Masjid, Kubah, dan hiasan lukis Ayat Al-Qur'an hingga tata cara kepemimpinan raja yang menerapkan nilai-nilai keislaman (Puar 1980, h. 32). Raja-raja tersebut menerapkan toleransi keagamaan dan

menghormati keberadaan para kelompok Ulama-Ulama (Mullah) Iran yang memiliki pengaruh cukup besar bagi kemajuan sosial dan politik di Iran (Cipto 2004, h. 9).

Konsep Monarki Konstitusional yang telah lama menjadi model pemerintahan Iran ini dengan mudah dihilangkan oleh Reza Shah Pahlevi yang memimpin Iran pada 1941-1979. Ini dikarenakan budaya westernisasi yang berkiblat pada barat khususnya AS, diterapkan Shah yang tidak memikirkan pola-pola tradisi asli kehidupan masyarakat Iran (Puar 1980, h. 31). Misalnya, kebudayaan Islam yang sudah menjadi dasar Negara Iran sejak awal diterapkannya monarki tidak mendapat perhatian. Bahkan terjadinya penentangan agama dengan cara menyalahgunakan media radio, televisi dan surat kabar yang ditujukan kepada kelompok Mullah Iran (Kedutaan Besar RII 1989, h. 9). Selain itu, perubahan model westernisasi yang diusung AS tidak merata ke seluruh rakyat Iran (Ansari 2008, h. 60). Misalnya, Shah bersama AS membangun pabrik pembotolan modern untuk Pepsi dan Coke. Sementara rakyat di sudut-sudut kotor kota masih minum dari selokan aliran air terbuka yang berada di sisi jalan dan berisi segala macam sampah (Ansari 2008, h. 60). Hotel Hilton mewah buatan AS pun dibangun di Iran, sementara ratusan rakyat Iran belum memiliki rumah dan tidur di jalanan (Ansari 2008, h. 60). Kemudian, kerajaan Reza Shah juga dikuasai oleh para penasihat dari AS, proyek pembangunan bersama AS terus dibangun, merubah prosedur kantor pemerintahan dengan prosedur birokrasi AS (Ansari 2008, h. 60). Semua ini membuat degradasi tata cara kehidupan tradisional masyarakat Iran dan bertentangan dengan sejarah budaya Iran (Puar 1980, h. 31).

2. Pasca Revolusi Islam Iran 1979

Terjadi pergolakan didalam negeri Iran, ketidakpuasan rakyat Iran dengan kepemimpinan Reza Shah Pahlevi, rakyat bersatu bersama kelompok Ulama menggalang kekuatan untuk menggulingkan Reza Shah dari puncak kekuasaannya. Tidak hanya itu, budaya westernisasi yang mengikis nilai-nilai

tradisional budaya Iran dan pembunuhan bagi masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah menjadi alasan bagi rakyat dan Ulama untuk menjatuhkan Reza Shah Pahlevi (Kedutaan Besar RII 1989, h. 9). Terbukti pada 10 Februari tahun 1979, rezim Shah beserta tentaranya dengan persenjataan lengkap terpaksa menyerah dihadapan kesatuan rakyat dan kelompok Ulama Iran yang dipimpin oleh Imam Ayatullah Khomeini yang kemudian disebut sebagai Revolusi Islam Iran (Puar 1980, h. 44). Keberhasilan Revolusi Islam Iran menurunkan Shah dari puncak kekuasaannya juga berdampak signifikan bagi Amerika Serikat yang semakin sulit untuk kembali menjalin hubungan dengan Iran. Bagaimana tidak, salah satu alasan terjadinya Revolusi Islam Iran karena bentuk kedekatan Shah dengan AS yang terlalu membuka ruang bagi AS untuk mengeksploitasi Iran.

Pasca Revolusi Islam Iran, Amerika Serikat semakin sulit untuk mengendalikan Iran. Bahkan salah seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional AS Karen Brooks mengatakan, bahwa Pemerintah AS sangat menghormati Iran. Cara pendekatan AS kepada Iran tidak bisa seperti umumnya dilakukan kepada negara-negara di Timur Tengah lainnya. Karena Iran bukanlah negara yang tertinggal, bangsa Iran merupakan bangsa yang maju, cerdas pemikirannya dan tinggi pendidikannya. Atas dasar itulah tidak mudah bagi AS untuk kembali mempengaruhi Iran. Apalagi setelah Revolusi Islam bangsa Iran sudah memiliki tradisi demokrasi sendiri sehingga tidak ada alasan bagi AS untuk ikut campur dalam upaya penegakan demokrasi (Rahman 2003, h. xix).

Nampaknya pernyataan Karen Brooks tersebut terbukti benar. Pasalnya, Iran merupakan negara yang diperhitungkan kekuatannya di Kawasan Timur Tengah oleh Amerika Serikat (Gogary 2007, h. 267). Misalnya, terhitung kisaran waktu seperempat abad setelah terjadinya Revolusi Islam, AS belum berani kembali melancarkan politik luar negeri ekspansionisnya ke Iran. Bahkan, pemikiran AS bahwa kekuasaan dan kepemimpinan para Ulama Iran tidak akan mampu bertahan lama ternyata salah, buktinya Ulama masih

terus bertahan, bahkan semakin kuat pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan politik di Iran (Rahman 2003, h. xviii).

Pada tahun 1981, Revolusi Islam Iran mengalami sedikit gangguan dikarenakan adanya skandal Iran Gate, skandal yang melibatkan pemimpin tertinggi Imam Ayatullah Khomeini dan mantan Presiden Rafsanjani, terungkap dikalangan Pemerintah Iran oleh mantan Presiden Iran Abu Hassan Bani Sadr (Adiguna, Tempo Interaktif, 6 Juni 1987). Skandal Iran Gate merupakan peristiwa penjualan senjata militer milik Amerika Serikat yang dijual oleh Israel ke Iran dengan persetujuan konselor AS Robert McFarlane dan David Kimche Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel, yang ditukar dengan pembebasan dua sandera AS ketika terjadinya Revolusi Islam 1979 (Marshall et al. 1987, h. 172). Namun, peristiwa tersebut cepat diselesaikan oleh Imam Khomeini sehingga tidak menjadi kasus yang berdampak buruk terhadap sosok pribadi Imam Khomeini dan Revolusi Islam tahun 1979 (Adiguna, Tempo Interaktif, 6 Juni 1987).

Pasca Revolusi Islam tahun 1979 dan skandal Iran Gate tahun 1981, segala bentuk kerjasama yang pernah terjalin antara Reza Shah Pahlevi dengan Amerika Serikat dibatalkan begitu saja pemerintahan AS (Gogary 2007, h. 313). Tidak hanya itu, AS juga membekukan beberapa aset kekayaan Iran yang berada di bank milik AS. Keadaan seperti ini justru akan semakin menumbuhkan semangat nasionalisme Iran untuk kembali membangun Iran yang maju setelah Revolusi Islam. Terutama keadaan perekonomian Iran yang hancur setelah Revolusi Islam dan pasca Perang Irak-Iran pada tahun 1980-1988, kemudian dibangun oleh Presiden Hashemi Rafsanjani yang berasal dari kubu konservatif Iran (Cipto 2004, h. 41). Presiden Rafsanjani memimpin Iran periode tahun 1989-1997. Selama Presiden Rafsanjani memimpin, AS belum berani untuk memulai langkah untuk kembali membuka kerjasama dengan Iran. Dikarenakan dilema AS terhadap kelompok konservatif Iran yang merupakan penggerak terjadinya Revolusi Islam. Iran selama dipimpin oleh kelompok konservatif maka AS semakin sulit untuk mengendalikan dan

mencampuri urusan dalam negeri Iran (Cipto 2004, h. 91). Menurut Presiden Rafsanjani jika AS ingin kembali menjalin hubungan kerjasama, maka AS harus menunjukkan niat baiknya terlebih dahulu. Hingga akhir kepemimpinannya berakhir pada 1997, Presiden Rafsanjani tetap tidak membuka jalan bagi AS untuk kembali bekerjasama dengan Iran. Bahkan kebijakan open door policy diberlakukan untuk seluruh Negara di dunia terkecuali bagi AS dan Israel (Cipto 2004, h. 44). Kemajuan ekonomi Iran secara signifikan pada masa kepemimpinan Presiden Rafsanjani menyebabkan beliau dijuluki “Bapak Pembangunan Iran” (Cipto 2004, h. 41).

Pengaruh Amerika Serikat di Iran mulai terlihat ketika Iran dipimpin oleh Presiden Muhammad Khatami pada periode tahun 1997-2005. Presiden yang berasal dari golongan reformis ini mengubah haluan kebijakan politik Iran yang telah disusun dan diperjuangkan kelompok Ulama pada Revolusi Islam. Melihat sosok Presiden Khatami yang begitu reformis dan terbuka bagi AS yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Bill Clinton segera melakukan pendekatan kepada Iran. AS tidak dapat menyembunyikan simpatinya terhadap Presiden Khatami, bahkan AS menjadikan ini sebagai peluang yang tepat untuk kembali menjadikan Iran sejalan dengan kepentingan AS. AS di kepemimpinan Presiden Clinton memiliki tujuan untuk menciptakan sistem multi partai, liberalisasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya di Iran (Rahman 2003, h. 23). Demokrasi menjadi jualan utama AS untuk memulai kembali memasuki ranah politik domestik Iran. Misi yang diinginkan AS ini sepadan dengan kebijakan yang dilakukan Presiden Khatami selama menjadi Presiden Iran yakni, toleransi, modernisme dan keterbukaan (Rahman 2003, h. 17).

Pengaruh Amerika Serikat di Iran pada masa kepemimpinan Presiden Khatami semakin meluas. Apalagi setelah Presiden Khatami membuka dialog-peradaban kepada AS (Cipto 2004, h. 96), dialog ini disambut dengan meriah oleh Presiden Bill Clinton. Dialog ini menguntungkan kedua pihak. Di satu sisi Iran meyakinkan AS untuk kembali

membuka hubungan kerjasama dengan Iran, dan di sisi lain AS mulai dapat membuka pengaruhnya di Iran melalui reformasi modernisasi dengan mengusung terbentuknya demokrasi di Iran yang bersahabat dan bersekutu dengan AS (Rahman 2003, h. 18). Walaupun Presiden Khatami membuka kerjasama dengan AS, hubungan Iran-AS semata-mata tidak mengalami perubahan signifikan ke arah perdamaian. Secara total misi AS untuk menguasai Iran untuk menyebarkan pengaruh demokrasinya yang sejalan dengan kebijakan Presiden Khatami belum berhasil. Ini dikarenakan peran dan pengaruh para Ulama Iran masih mendominasi dan merupakan lembaga tertinggi yang berpengaruh di Iran (Rahman 2003, h. 87). Berbagai kebijakan Presiden Iran yang menyimpang dari tujuan awal Revolusi Islam Iran akan ditentang oleh para kelompok Ulama Iran. Karena menurut Ulama Iran kebijakan membuka jalan kerjasama antara AS itu sama saja menentang Revolusi Islam 1979, agama dan negara (Cipto 2004, h. 93).

Tahun 2004 menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Khatami, Amerika Serikat semakin bersikap tegas terhadap Iran. Sulitnya AS melancarkan agresinya ke Iran menyebabkan AS untuk memilih bersikap keras untuk menundukkan Iran. Ternyata naiknya Khatami menjadi Presiden Iran tidak dapat mengubah struktur alamiah masyarakat Iran menuju reformasi ke arah yang lebih liberal. Ini yang menyebabkan AS mengubah sikap dengan melakukan tekanan terhadap Iran (Rahman 2003, h. 16). Media internasional seperti newsweek dan time mencoba memprediksi situasi dengan mengatakan bahwa target AS selanjutnya setelah invasinya ke Irak kemungkinan adalah Iran. Prediksi tersebut kurang akurat. Kenyataannya setelah Presiden Mahmoud Ahmadinejad terpilih menjadi Presiden Iran periode tahun 2005-2009, menggantikan Khatami, AS hanya melakukan tekanan dan ancaman secara terbuka kepada Iran (Rahman 2003, h. xvii).

Presiden George Walker Bush menuduh Iran di kepemimpinan Presiden Ahmadinejad telah mengembangkan senjata nuklir. Berbagai strategi dilakukan Amerika Serikat,

mulai dari melakukan pengintaian melalui CIA (Central Intelligence Agency), AS mendanai kelompok pembangkang seperti suku Kurdi di Iran untuk bekerjasama dengan AS (Gogary 2007, h. 317). Melalui CIA, AS berhasil menemukan instalasi nuklir Iran yang bernama Natanz yang menurut AS telah dijadikan tempat pengembangan heavy water yang digunakan sebagai fast breeder reaktor yang dapat menghasilkan plutonium untuk pembuatan senjata nuklir (Rahman 2003, h. xvii).

Pemerintah Ahmadinejad membantah tuduhan tersebut, tetapi pemerintah Iran mengakui bahwa Iran sedang mengembangkan teknologi program nuklir, namun untuk tujuan damai yakni, sebagai energi listrik bukan untuk digunakan sebagai senjata nuklir. Badan Atom Internasional IAEA (International Atomic Energy Agency) yang merupakan otoritas untuk memeriksa pengembangan nuklir dunia pun menyatakan bahwa, pengembangan nuklir Iran tidak terindikasi menuju pengembangan senjata nuklir (Jamaan 2007, h. 48). Presiden Ahmadinejad juga menyatakan bahwa Iran akan mengembangkan sekitar 20 pusat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan Iran akan menyalurkan tenaga listrik nuklir tersebut untuk kebutuhan domestik negaranya (Rahman 2003, h. xvii).